

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PONTIANAK

Zhafiera Ivaliant Amanda¹, Netty Herawati², Dwi Haryono²
Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

surel: zhafieraivaliantamanda@student.untan.ac.id

Abstrak

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pontianak, sehingga penulis dapat mengetahui apa saja faktor penghambat pada kebijakan QRIS dan bagaimana perkembangan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai implementor kebijakan QRIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan subjek dilakukan dengan cluster area dan dianalisis menggunakan teori Edward III yang berasumsi pada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari lima ribu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak belum bergabung sebagai merchant QRIS. Masyarakat masih memilih penggunaan uang tunai sebagai transaksi pembayaran, masih banyaknya pedagang atau pelaku usaha yang belum memiliki smart phone sebagai infrastruktur penggunaan QRIS. Bahkan, pelaku UMKM banyak yang belum mengerti sistem penggunaan dan manfaat dari adanya transaksi pembayaran digital QRIS. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang harus diberikan implementor yakni Bank Indonesia agar pelaku UMKM sadar akan perkembangan era digital yang sudah mengharuskan untuk bersaing di dunia perdagangan sehingga dapat memulihkan perekonomian daerah dan Negara. Selain itu implementor juga harus kerja sama yang baik dengan pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan untuk memaksimalkan kebijakan transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Di Kota Pontianak.

Kata Kunci : Implementor, Bank Indonesia, era digital.

A. PENDAHULUAN

Era ini selanjutnya mendorong transformasi sistem pembayaran dari uang kartal (kertas dan logam) dan *paper based* (cek, bilyet giro, nota kredit/debit) menuju card based dan server based. Card atau chip based meliputi kartu ATM, kartu kredit/debit, dan UE berbasis chip (kartu) yang dapat diisi saldo (misal: kartu UE di SPBU dan jalan tol). Sementara itu, *server based* menggunakan platform aplikasi yang penggunaannya meningkat seiring perkembangan ekonomi digital (misal: mobile payment dengan pemindaian kode QR). Terbentuknya kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan untuk para pelaku UMKM. Untuk kelebihan dari QRIS yaitu seluruh transaksi pemilik UMKM yang bergabung pada QRIS sudah langsung tercatat dengan otomatis tanpa perlu direkap, dengan begitu hal ini akan mempermudah jika pemilik UMKM ingin mengajukan kredit ke Bank. Pelaku UMKM tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian, bebas resiko uang palsu dan pencurian, dapat mengikuti tren dalam penjualan. Namun, tentunya QRIS juga memiliki kekurangan, QRIS tidak dapat digunakan pada *mobile phone* yang tidak ada kamera untuk scan barcode, penggunaan QRIS juga harus terkoneksi internet dan memiliki kuota internet

tentunya. Hal ini dapat mempersulit daerah yang jauh dari jangkauan internet sehingga belum bisa menggunakan sistem transaksi digital ini.

Pembayaran melalui pemindaian kode QR merupakan salah satu sistem pembayaran berbasis *server*. Sistem pembayaran ini berkembang seiring perkembangan ekonomi digital.

Melihat dari latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi adanya masalah sebagai berikut :

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang masih banyak belum mengetahui apa itu QRIS dan fungsinya.
2. Masih adanya pihak yang tetap menggunakan uang kertas dalam bertransaksi.
3. Tidak semua masyarakat memiliki *Smart Phone* untuk akses scan barcode.
4. Masih banyaknya pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang belum bergabung sebagai Merchant QRIS.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada tanggapan publik mengenai adanya kebijakan baru yaitu kebijakan QRIS. Pada penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana tanggapan UMKM (Usaha

Mikro Kecil Menengah) mengenai adanya sistem pembayaran atau transaksi digital yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Dan mengapa implementasi QRIS belum optimal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara keseluruhan dan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Meleong, 2013, 6).

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan alasan agar penulis dapat mengetahui dan menganalisis pembahasan dalam hadirnya kebijakan sistem transaksi digital yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yang di inisiasi oleh Bank Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sistem pembayaran digital QRIS sudah mudah kita temui di meja kasir dari UMKM besar, menengah, kecil hingga pasar tradisional. Adanya sistem

pembayaran digital berpengaruh tentunya pada perekonomian di Kota Pontianak. Dengan semakin mengikuti era digital, Kota Pontianak diyakini mampu untuk bersaing pada era digital saat ini.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah orang yang dianggap mampu memberikan keterangan informasi atau data yang berkaitan dengan tanggapan adanya sistem pembayaran transaksi digital *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Oleh karena teknik penentuan subyek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Adapun informan yang diminta keterangan dalam penelitian ini adalah :

1. Bank Indonesia sebagai pemilik inisiasi sistem transaksi digital *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Untuk mengetahui bagaimana Bank Indonesia khusus kan Kantor Perwakilan Kalbar dalam mengedukasi suatu sistem pembayaran digital kepada masyarakat Kota Pontianak.
2. Pelaku UMKM yang telah bergabung Merchant QRIS dan yang belum bergabung sebagai Merchant QRIS.
3. Pemerintah Kota Pontianak (Dinas Usaha Mikro, Koperasi dan Perdagangan) yang tentunya dalam kebijakan ini turut mensukseskan dan mendukung penuh atas adanya Kebijakan *Quick Response Code*

Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pontianak.

Obyek penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah tanggapan masyarakat tentang adanya system pembayaran digital yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Kota Pontianak.

Menurut Sugiyono (2012,309) pengumpulan data dilakukan *natural setting* (kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*) , wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi..

C. PEMBAHASAN

Menurut pendekatan Edward III (dalam Agustino, 2012:150-153), terdapat empat *variable* yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. Berdasarkan teorema ini peneliti akan menjabarkan satu per satu bagaimana komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Pontianak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari lima ribu pelaku Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak belum bergabung sebagai merchant QRIS. Masyarakat masih memilih penggunaan uang tunai sebagai transaksi pembayaran, masih banyaknya pedagang atau pelaku usaha yang belum memiliki smart phone sebagai infrastruktur penggunaan QRIS. Bahkan, pelaku UMKM banyak yang belum mengerti sistem penggunaan dan manfaat dari adanya transaksi pembayaran digital QRIS.

Komunikasi

Memulai kebijakan baru yang baik, tentu harus dan dibutuhkannya suatu komunikasi yang terarah antara beberapa pihak terkait. Komunikasi antara implementor (Bank Indonesia) Kantor Perwakilan Kalbar dengan Dinas Usaha Mikro, Koperasi dan Perdagangan belum dapat dikatakan sesuai dan terarah. Menurut hasil penelitian, peneliti melihat bahwa Dinas Usaha Mikro, Koperasi, dan Perdagangan tidak memiliki data terkait pengawasan perkembangan kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Beberapa hal terkait, UMKM juga masih dilaksanakan hanya bila ada komando dari Bank Indonesia saja. Itu berarti bahwa, komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan implementor masih tergolong belum dapat dikatakan baik dan sesuai. Tetapi, antara

Pemerintah Kota Pontianak dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalbar selalu memberikan sosialisasi melalui media sosial terutama di Instagram untuk memberikan informasi terbaru terkait Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Gambar 1. Bank Indonesia Selalu Memperkenalkan QRIS Melalui Sosial Media



Sumber: Instagram Bank Indonesia KPw Kalbar

Sumber Daya

Penghematan biaya cetak uang kertas Mendukung perluasan pasar komoditas UMKM lokal karena transaksi dapat dilakukan dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun tanpa harus bertemu secara langsung terlebih dimasa pandemi Covid-19 dengan QRIS TTM (tanpa tatap muka) transaksi tersebut dapat dilakukan. Aliran dana akan lebih cepat dan aman

sehingga sisi supply dan demand di masyarakat dapat cepat bergerak. Mendukung transaksi pelaku UMKM retail bahkan pedagang batagor untuk melakukan transaksi secara efisien dan efektif Dengan adanya standarisasi barcode QR pembayaran diharapkan tidak ada PJSP yang memonopili transaksi pembayaran melalui QR. Pemerintah tetap dapat memonitoring alur transaksi masyarakat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan system pembayaran kedepannya. Mengefisiensikan transaksi pembeli dengan banyaknya pilihan QR code pembayara Meningkatkan perekonomian melalui kemudahan bertransaksi.

Selain memberikan fasilitas kepada seluruh UMKM yang telah mendaftar sebagai Merchant QRIS, Bank Indonesia KPw Kalbar juga memberikan pelatihan foto produk agar pelaku UMKM semakin dapat meningkatkan kualitas dari segi manapun. Hal ini dilakukan Bank Indonesia KPw Kalbar secara gratis yang dapat diikuti oleh Merchant QRIS yang telah mendaftar..

Disposisi

Tingkat komitmen dan konsistensi implementor dalam kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) penulis dapat menyebutnya dengan

“berkomitmen” akan kebijakan yang telah diluncurkan setahun yang lalu. Implementor pun tak henti-hentinya untuk selalu memberikan sosialisasi dan informasi kepada banyak pihak. Tidak hanya dengan itu saja, beberapa bentuk kegiatan, games, bahkan perlombaan juga diadakan oleh implementor untuk membentuk kepercayaan masyarakat pada kebijakan transaksi digital.

Pada saat meeting zoom bersama bapak Agus Chusaini selaku Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalbar mengatakan bahwa setiap ada pertanyaan mengenai permasalahan implementasi kebijakan QRIS pasti akan ada solusinya dan Bank Indonesia selalu berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan bijak.

Karena pada kebijakan pembayaran digital mengharuskan pemilik menggunakan smartphone dan berada dalam koneksi internet, dikarenakan jaringan internet dan smartphone sebagai pendukung terlaksananya transaksi digital QRIS..

Struktur Birokrasi

Ketersediaan Standar Operasional QRIS dinilai penulis sangat mudah dipahami, dan implementor pun selalu memberikan edukasi dan sosialisasi tapi belum dapat dikatakan cukup bahwa seluruh masyarakat akan paham dengan

penggunaan transaksi digital QRIS. Untuk merchant yang akan bergabung pada QRIS, implementor telah menyiapkan PJSP Bank maupun non bank untuk dapat membantu pelaku UMKM mendaftar sebagai merchant QRIS. Untuk pendaftaran sebagai merchant QRIS, diakui oleh implementor bahwa dapat bergabung secara gratis atau tanpa biaya. Adanya QRIS dapat mengubah cara penjualan pelaku UMKM dari yang sistem lama menjadi modern. Hanya dengan scan barcode bias melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Implementor meninformasikan perkembangan program melalui media sosial Instagram official nya yakni @bankindonesia_kalbar agar dapat diakses oleh masyarakat yang ingin mengetahui info terbaru mengenai QRIS. Penulis menelaah, bahwa implementor yakni Bank Indonesia khususnya Kantor Perwakilan Kalbar bekerja sama dengan pemerintah Kota Pontianak untuk mensukseskan program kebijakan transaksi digital..

D. SIMPULAN

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa butuhnya ditingkatkan sosialisasi dan edukasi yang harus diberikan implementor yakni Bank Indonesia agar pelaku UMKM sadar akan perkembangan era digital yang

sudah mengharuskan untuk bersaing di dunia perdagangan sehingga dapat memulihkan perekonomian daerah dan Negara. Selain, itu implementor juga harus kerja sama yang baik dengan pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan untuk memaksimalkan kebijakan transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Di Kota Pontianak.

SARAN

Peneliti menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan yaitu:

1. Untuk menjadikan transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan penggunaan pembayaran non tunai meningkat, dibutuhkan nya kerjasama yang baik dan berkualitas antara Bank Indonesia sebagai implementor dengan Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan maksimal, sehingga seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semua di Kota Pontianak dapat bergabung sebagai merchant QRIS, masyarakat pun dapat merubah pola perilaku

pembayaran dari tunai menjadi non tunai berbasis digital.

2. Sumber Daya, yang diberlakukan untuk proses implementasi kebijakan transaksi pembayaran digital dapat berjalan dengan lancar. Sumber daya dari implementor, kewenangan implementor, hingga sumber daya yang dapat memfasilitasi kebutuhan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan pelaku UMKM yang sudah bergabung sebagai merchant QRIS hingga yang belum bergabung sebagai merchant QRIS.
3. Disposisi, kebijakan Quick Respons Code Indonesian standard (QRIS) yang terlaksana maksimal, mulai dari mengedukasi pelaku UMKM, memberikan arahan teori maupun praktek tentang penggunaan transaksi digital QRIS, mensosialisasikan tentang apa saja yang perlu diperhatikan jika penggunaan transaksi digital ini telah berlangsung, hingga kekurangan dan kelebihan dari transaksi digital QRIS.
4. Struktur Birokrasi, meningkatkan standar operasional kebijakan Quick Respons Code Indonesian Standard (QRIS) yang lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM dan tentunya masyarakat agar menimbulkan rasa percaya yang tinggi jika penggunaan

transaksi berbasis digital QRIS non tunai ini bertujuan mempermudah pekerjaan masyarakat dalam melakukan transaksi. Sehingga, kebijakan penggunaan transaksi digital ini digunakan semua lapisan masyarakat di Kota Pontianak sebagai transaksi utama, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan penggunaan QRIS ini, dan masyarakat juga masih menggunakan uang tunai sebagai media utama dalam pembayaran disetiap transaksi.

E. REFERENSI

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Alhakim, Suparlan. 2015. *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani
- Ardial. 2014. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- , Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers..
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta:Gava Media
- Jogiyanto, Prof. 2008. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moleong, J. L., 2000. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Schermerhorn, J.R., James G. Hunt, & Richard N. Osborn. 1994. *Managing Organization Behavior*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- #### INTERNET
- Bi.go.id (2020, 13 April). *Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS*.
Diakses 13 April 2020
- Kompasiana.com (2020, 11 April). *Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard*.
Diakses 11 April 2020
- <https://teori-inkremental-incremental-theory>. *Teori Inkremental Kebijakan*.
Diakses 15 November 2020
- <https://www.jurnal.id/id//pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia>
Diakses 15 Desember 2020

<https://linkaja-implementasikan-qrismelalui-digitalisasi-pasar>

Diakses 4 Januari 2021

<https://infobanknews.com/topnews/implementasikan-qr-28-transaksi-dana-berasal-dari-pjsp/>

Diakses 4 Januari 2021

<https://keuangan.kontan.co.id/news/dukungan-transaksi-digital-ovo-luncurkan-fitur-bayar-qr>

Diakses 4 Januari 2021

<https://www.solopos.com/qr-pembayaran-digital-semakin-praktis-solusi-efektif-di-masa-pandemi-1102186>

Diakses 17 Maret 2021

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=standar+operasional+qr>

Diakses 17 Maret 2021

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/9/1138176/opini-qr-code-nasional-menuju-efisiensi-pembayaran>

Diakses 17 Maret 2021

SUMBER TESIS

Setiawan, I Wayan Arta. *QRIS Dimata UMKM; Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS*. Jakarta :Universitas Pendidikan Nasional.